
**ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KOTA SURABAYA****Oleh****Nuzulul Siswo Abdulaziz****Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya****Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota SBY, Jawa Timur,
Indonesia****Email : nuzululsiswoaziz@gmail.com****Abstrak**

Kota Surabaya merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut dapat dijadikan kesempatan untuk Kota Surabaya agar mengoptimalkan penerimaan daerah. Beberapa kota di Indonesia telah berhasil menggunakan secara efektif pendapatan daerahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah serta mengetahui tingkat efektivitas PAD terhadap pendapatan daerah. Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang bersumber dari data Laporan Realisasi Anggaran Kota Surabaya Tahun 2015-2019. Hasil dari penelitian ini yaitu Kota Surabaya diketahui telah mampu melaksanakan otonomi daerah dengan baik, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kota Surabaya berada di rata-rata 61,47% yang masuk kategori sangat baik, hal ini berarti bahwa Pemerintah telah mampu meningkatkan PAD hingga melampaui anggaran dana pendapatan asli daerah Kota Surabaya, selain itu Pemerintah telah mengupayakan dalam pemanfaatan sumber daya yang ada sehingga dari tahun ke tahun Kota Surabaya selalu maksimal dalam pemungutan pendapatan asli daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan tingkat efektivitas PAD terhadap pendapatan daerah Kota Surabaya tahun 2015-2019 menunjukkan kategori sangat efektif, selama lima tahun berturut-turut nilai efektivitas selalu diatas 100% yang berada di rata-rata 109,6% hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil mencapai bahkan melampaui target PAD.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah & Pendapatan Daerah.**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara berkembang yang berada di status upper middle income. Dalam mewujudkan pembangunan nasional Indonesia membutuhkan peran dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta seluruh masyarakat. Seiring berjalannya waktu, adanya era reformasi di Indonesia memberikan pandangan baru yang dinilai lebih adil dan efektif daripada paradigma yang telah lalu. Pandangan baru tersebut berupa kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan dari pemerintah pusat. Hal tersebut telah diatur dalam UU no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah serta UU no. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Adanya undang-undang tersebut

bertujuan agar daerah dapat menggali potensi lokal daerahnya sendiri.

Untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah secara luas, mulai urusan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi dari perencanaan pembangunan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat suatu daerah. Ada beberapa macam sumber pendapatan daerah yaitu PAD (Pendapatan Asli Daerah), dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah. Sumber PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Untuk dana perimbangan bersumber dari transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, sedangkan dana lain-lain pendapatan

yang sah berasal dari pendapatn hibah, pendapatan darurat dan pendapatan lainnya.

Halim (2002) dalam (Ramadhani, 2016) menyatakan bahwa pemerintah daerah yang mampu membiayai kegiatan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan perencanaan pembangunan dengan hasil pendapatan hasil daerah sendiri disebut sebagai daerah yang mandiri. Kota Surabaya merupakan kota metropolitan yang dikelilingi oleh gedung-gedung besar, baik gedung pemerintah, gedung pendidikan, supermarket, mall, stadion, hotel, apartemen dan perusahaan-perusahaan besar. Kota Surabaya juga dijadikan ibu kota provinsi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut dapat dijadikan kesempatan untuk Kota Surabaya agar mengoptimalkan penerimaan daerah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anton Trianto yang berjudul “Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palembang” dengan menggunakan studi kasus Kota Palembang yang sama-sama merupakan kota pesat yang tidak jauh berbeda dengan Kota Surabaya, hasil penelitian tersebut menunjukkan secara keseluruhan nilai rasio efektivitas keuangan daerah Kota Palembang menunjukkan keefektifan. Serta efesiensi keuangan daerah menunjukkan kurang efisien. Hal tersebut terjadi karena penggunaan dana belanja daerah melebihi pendapatan daerah (Trianto, 2013).

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Febby Randria Ramdhani dengan judul “Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah di Kota Tarakan 2010-2015” menunjukkan rasio kemandirian keuangan daerah Kota Tarakan sangat rendah dengan rata-rata 1,59%. Sedangkan rasio efektivitas masuk pada kategori efektif dengan rata-rata 90%. Dari hasil penelitian terdahulu yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan beberapa kota di Indonesia telah berhasil menggunakan secara efektif pendapatan daerahnya. Mengetahui efektivitas dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah mempunyai peran penting

untuk keberhasilan kemandirian dan pembangunan di Kota Surabaya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah” dengan studi kasus Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah serta mengetahui tingkat efektivitas PAD terhadap pendapatan daerah.

LANDASAN TEORI

1. Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan” (*Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah*, 2004).

Otonomi daerah dilaksanakan dengan wewenang yang sangat luas serta dapat dipertanggung jawabkan dengan seimbang. Tidak asal mengatur daerah akan tetapi harus dengan tanggung jawab yang nyata, dengan mengikuti peraturan yang telah dibagi dan dimanfaatkan secara adil serta dengan perimbangan antara pusat dan daerah (Kusumastuti, 2010).

Daerah otonom diartikan sebagai perkumpulan masyarakat secara hukum yang mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengolah daerahnya sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat yang ada di daerah tersebut, dengan mengacu pada aspirasi masyarakat yang mengerucut pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widjadja, 2014). Uhumwango dan Aibieyi (2013) dalam (Taras and Artini, 2017) mengatakan bahwa pembangunan suatu daerah memang harus berasal dari dalam, karena pembangunan akan berjalan lancar apabila itu berasal dari kehendak dan aspirasi dari orang-orang didalamnya. Pemerintah daerah juga dituntut

untuk meningkatkan keterampilan dan efektivitas dalam memimpin pemerintahan di suatu daerah.

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk menggali potensi local yang ada di daerahnya masing-masing guna melaksanakan otonomi daerah (Yani, 2008)

3. Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 pasal 1 poin 15 Tentang Pemerintah Daerah yaitu pendapatan daerah diartikan sebagai hak-hak yang secara resmi diakui bertambahnya nilai kekayaan yang bersih pada periode tahun yang bersangkutan. Abdul Halim (2004) dalam (Adelina, 2013) mengemukakan bahwa pendapatan daerah ialah pemasukan daerah yang bertujuan untuk peningkatan pendapatan maupun mengurangi hutang dari beberapa sumber. Sumber pendapatan daerah daerah yakni:

1. PAD
2. Dana perimbangan
3. Lain-lain pendapatan yang sah

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan sebuah keadaan serta menyelesaikan masalah berdasarkan data baik data primer maupun data sekunder, selain menjelaskan sebuah data, deskriptif juga bisa diartikan sebagai penelitian yang isinya menginterpretasi dan menganalisis data (Narbuko and Achmadi, 2007). Sedangkan penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data atau mengubah kualitatif menjadi angka (Sugiyono, 2003). Data yang digunakan yaitu data sekunder yang bersumber dari data Laporan Realisasi Anggaran Kota Surabaya Tahun 2015-2019.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu Teknik dokumenter, dengan menggunakan metode pengambilan keputusan melalui data-data yang telah dipublikasi oleh instansi pemerintah. Sedangkan untuk Teknik analisis data menggunakan beberapa rumus untuk menjawab rumusan masalah. Untuk menghitung nilai kontribusi menggunakan rumus :

$$\text{Kontribusi PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Halim, 2004

Tabel 1. Kriteria Kontribusi PAD

Presentase	Kriteria
≥50	Sangat Baik
40-50	Baik
30-40	Sedang
20-30	Cukup
10-20	Kurang
≤10	Sangat Kurang

Sumber: Halim, 2004

Untuk menghitung nilai efektivitas, digunakan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Nurlan and Darise, 2006

Tabel 2. Kriteria Efektivitas PAD

Presentase	Kriteria
Lebih dari 100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Nurlan and Darise, 2006

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kota Surabaya

Surabaya merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur. Peran Kota Surabaya sangat penting, karena Kota Surabaya dijadikan sebagai pusat Satuan Wilayah Pengembangan Utama (SWPU) C yakni Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Selain itu Kota Surabaya juga dijadikan

wilayah pengembangan untuk Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) I yakni Gerbang kertosusila, Kabupaten Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan. Pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya sangat cepat, oleh karenanya Surabaya dijadikan sebagai pondasi yang kuat serta diharapkan dapat mendongkrak perkembangan ekonomi di daerah sekitarnya baik secara langsung maupun tidak. Begitu sebaliknya bagi hinterland yang berada di sekitar Kota Surabaya diharapkan mampu mendukung dan menopang bagi perkembangan ekonomi di Kota Surabaya. Sehingga hubungan keduanya dapat menimbulkan efek multiplier (Hehamahua, 2014).

2. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah

Usaha mengoptimalkan pendapatan daerah Kota Surabaya telah diupayakan semaksimal mungkin dengan tetap mengikuti undang-undang yang berlaku agar dapat meningkatkan kegiatan pemungutan PAD.

Tabel 3. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Kontribusi %	Kategori
2015	4.035.649.478.397,97	8.018.031.300.526,07	60,37%	Sangat Baik
2016	4.090.206.769.387,53	6.625.754.275.691,33	59,92%	Sangat Baik
2017	5.161.844.571.171,67	8.013.573.163.669,67	64,25%	Sangat Baik
2018	4.973.031.094.727,18	8.175.239.129.669,30	60,82%	Sangat Baik
2019	5.381.920.253.808,67	8.765.153.020.782,67	61,40%	Sangat Baik
Rata-rata			61,47%	Sangat Baik

Sumber: Data diolah

Dari Tabel 3, diatas dapat diketahui peran pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah sangatlah besar. Dari tahun ke tahun presentase kontribusi selalu berada di atas 50% hal ini menunjukkan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kota Surabaya sangat baik. Peningkatan cukup besar terjadi pada tahun 2017 dimana realisasi PAD cukup besar dari anggaran tahun 2017 yakni sebesar Rp. 5.161.844.571.171,67, sejalan dengan peningkatan tersebut maka kontribusi PAD kepada pendapatan daerah Kota Surabaya juga meningkat sebesar 64,25%. Selama lima tahun terakhir penurunan kontribusi terjadi pada

tahun 2018, kontribusi PAD hanya sebesar 60,83% hal tersebut dikarenakan anggaran PAD dan realisasi PAD hanya beda sedikit. Dengan rata-rata sebesar 61,47% menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kota Surabaya sangat baik.

3. Efektivitas PAD Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah dapat dikatakan efektif apabila realisasi PAD dapat memenuhi atau melebihi target PAD. Rasio efektivitas menjelaskan upaya pemerintah daerah dalam memenuhi realisasi PAD yang dianggarkan, daripada realisasi yang telah ditentukan sesuai riil daerah.

Tabel 4. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Target PAD (Rp)	Efektivitas %	Kategori
2015	4.035.649.478.397,97	3.782.647.234.297,00	106,6%	Sangat Efektif
2016	4.090.206.769.387,53	3.844.607.120.125,00	103,5%	Sangat Efektif
2017	5.161.844.571.171,67	4.708.642.546.045,00	109,6%	Sangat Efektif
2018	4.973.031.094.727,18	4.758.967.236.900,00	104,1%	Sangat Efektif
2019	5.381.920.253.808,67	5.234.687.226.266,00	102,8%	Sangat Efektif
Rata-rata			105,6%	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah

Sesuai dengan tabel 4 diatas menunjukkan bahwa PAD telah berjalan sangat efektif selama lima tahun terakhir. Meskipun nilai presentase cenderung menurun setiap tahunnya, akan tetapi Pemerintah Kota Surabaya masih aman pada konsistensi angka presentase diatas 100%. Pada tahun 2015 target PAD sebesar Rp. 3.782.647.234.297,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.035.649.478.397,97, dengan presentase 106,6% sehingga masuk kategori sangat efektif. Tahun 2015 merupakan tahun dengan presentase tertinggi selama lima tahun terakhir, dan tahun 2019 merupakan tahun terendah nilai presentase efektivitas PAD. Dari tahun ke tahun Pemerintah Kota Surabaya telah menunjukkan kinerjanya yang maksimal dalam merealisasikan PAD dengan rata-rata efektivitas sebesar 109,6% yang berarti sangat efektif.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa, Kota Surabaya diketahui telah mampu melaksanakan otonomi daerah dengan baik, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Kota Surabaya berada di rata-rata 61,47% yang masuk kategori sangat baik, hal ini berarti bahwa Pemerintah telah mampu meningkatkan PAD hingga melampaui anggaran dana pendapatan asli daerah Kota Surabaya, selain itu Pemerintah telah mengupayakan dalam pemanfaatan sumber daya yang ada sehingga dari tahun ke tahun Kota Surabaya selalu maksimal dalam pemungutan pendapatan asli daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

Sedangkan tingkat efektivitas PAD terhadap pendapatan daerah Kota Surabaya tahun 2015-2019 menunjukkan kategori sangat efektif, selama lima tahun berturut-turut nilai efektivitas selalu diatas 100% yang berada di rata-rata 109,6% hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil mencapai bahkan melampaui target PAD. Meskipun dari tahun ke tahun nilai efektivitas cenderung menurun akan tetapi masih berada di zona aman dan selalu konsisten melebihi target.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka perlu diberikan sedikit masukan dari penulis yakni hendaknya Pemerintah Kota Surabaya tetap dan terus meningkatkan prestasi yang telah dicapai Kota Surabaya saat ini, selain itu Pemerintah juga perlu memperbaiki fungsi manajemen mulai dari perencanaan hingga evaluasi, baik itu perencanaan jangka panjang, menengah maupun pendek. Pemerintah juga harus terus mengupayakan kebijakan yang terbaik di sector PAD agar otonomi daerah di Kota Surabaya terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Ramadhani, F. R, 2016, “Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah di Kota Tarakan Tahun 2010-

2015”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1).

- [2] Trianto, A.2013. “Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palembang”.
- [3] Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Diakses pada tanggal 5 November 2020.
<https://www.hukumonline.com/pusatdata/>
- [4] Kusumastuti, V. 2010. “Analisis Kontribusi, Efisiensi, dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah”.
- [5] Widjadja, H. 2014. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- [6] Taras, T. and Artini, L. G, 2017, “Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Badung Bali”, *E-Jurnal Manajemen Unud*, 6(5) hal 2360 –2387.
- [7] Yani, A. 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [8] Adelina, R, 2013, “Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gresik”.
- [9] Narbuko, C. and Achmadi, A. 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [10] Sugiyono. 2003. *Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- [11] Halim, A. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- [12] Nurlan and Darise. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: PT. Indeks IKAPI.
- [13] Hehamahua, H, 2014, “Analisis APBD Kota Surabaya Suatu Kajian Kemandirian Dan Efektifitas Keuangan Daerah”, *Media Trend*, Volume 9, hal 54–68.
- [14] Pemerintah Kota Surabaya. *Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015-2019*.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN